BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, pertama, sektor pertanian merupakan sektor yang mendasari kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Potensi dari sektor pertanian di Indonesia didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, serta kondisi iklim yang sangat baik untuk bertani. Sehingga, sektor pertanian layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Kedua, dalam proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 228-248 juta jiwa pada tahun 2008-2015. Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat besar dalam pengembangan sektor pertanian. Tantangan yang dihadapi sektor ini tentu dari sisi produktivitas, yang seharusnya semakin meningkat mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun, tetapi di satu sisi lahan garapan sawah semakin kecil akibat peralihan lahan pertanian ke industri-industri dan perumahan.

Ketiga, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang relatif besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap PDB riil setelah sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang

masing-masing menempati urutan pertama dan kedua. Hal ini membuktikan sektor pertanian bukanlah sektor yang dapat diabaikan dalam upaya peningkatan PDB Indonesia.

Keempat, sektor pertanian memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Khususnya dalam hal ketahanan sektor ini terhadap guncangan struktural dari perekonomian makro. Hal ini ditunjukkan oleh fenomena dimana sektor ini tetap mampu tumbuh positif pada saat puncak krisis ekonomi sementara sektor ekonomi lainnya mengalami kontraksi.

Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009, kontribusi sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan, tetapi tidak bagi sektor pertanian, sektor ini justru mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 14,5 persen menjadi 15,3 persen pada tahun 2009.

Tabel 1.1
Kontribusi Tiga Sektor Utama Terhadap PDB riil 2007-2010

Sektor	Kontribusi			
	2007	2008	2009	2010
Industri	27%	27,9%	26,4%	24,8%
Perdagangan, Hotel, & Restoran	15%	14,0%	13,4%	13,7%
Pertanian	13,7 %	14,5%	15,3%	15,7%

Sumber: BPS, data diolah 2007-2010

Permasalahan dalam sektor pertanian yang dihadapi Indonesia saat ini begitu kompleks mulai dari kebijakan, organisasi tani yang tidak berfungsi, modal, kepemilikan lahan, teknologi dan informasi, serta tata niaga (Apriantono, 2012). Kebijakan pemerintah untuk sektor pertanian, misalnya

menyangkut alih fungsi lahan, skala usaha tani, rencana tata ruang wilayah, dan sebagainya yang belum memihak petani sebagai subjek pembangunan sektor pertanian. Masih perlu pengajian ulang agar petani lebih mudah memahami setiap kebijakan dari pemerintah atau instansi-instansi terkait. Organisasi tani yang belum berfungsi disini diakibatkan masih kurangnya kesadaran para petani untuk berorganisasi dan bekerja sama dalam rangka mengelola lahan yang ada serta pengelolaan hasil tani itu sendiri. Apabila terdapat organisasi tani yang baik diharapkan dapat membawa keringanan bagi petani untuk terus bercocok tanam dan meningkatkan kesejahteraan bersama dikalangan petani tersebut.

Petani sangat lemah dalam hal permodalan, bahkan tidak memiliki akses yang mudah untuk meminjam dana sebagai modal awal produksi kepada perbankan. Hal ini dikarenakan berbagai persyaratan yang menyulitkan petani. Sebagai akibatnya petani lebih cenderung untuk memilih lembaga non bank dalam peminjaman modal awal produksi tani atau bahkan untuk menyambung hidup sehari-hari.

Selain itu masalah lainnya untuk membangun pertanian di Indonesia adalah teknologi dan informasi yang masih jauh dari yang diharapkan. Keterbatasan informasi mengenai teknologi yang tepat bagi tanaman pangan berdampak kembali bagi produktivitas tanaman pangan. Teknologi yang tepat guna tentunya akan meningkatkan produktivitas sehingga kebutuhan pangan terpenuhi, tetapi tetap tidak bisa diabaikan, petani dalam hal ini harus aktif untuk mengetahui bagaimana penerapan teknologi tersebut. Apabila ada

teknologi tetapi sumber daya manusia belum siap menggunakannya maka teknologi ini akan menjadi wacana saja.

Tata niaga produk pertanian dalam hal ini beras juga begitu penting, karena proses inilah yang menghubungkan produsen dan konsumen akhir. Tata niaga sangat diperlukan dalam hal menjual hasil produksi pangan oleh para petani untuk sampai kepada konsumen akhir, hanya saja tata niaga pertanian saat ini perlu dibenahi. Seringkali terdapat harga yang tak wajar, marjin antara setiap pelaku pasar dalam rantai tata niaga gabah/ beras juga berbeda-beda dan yang paling dirugikan adalah petani.

Sebagai contoh, dalam harian Kompas pada tanggal 19 September 2011 harga gabah kering giling di tingkat petani saat ini antara Rp 4.000,00 sampai Rp 4.500,00 per kilogram sedangkan harga beras di pasaran adalah Rp 6.500,00 ditingkat grosir (Prabowo, 2011). Begitu terlihat perbedaan marjin profit yang diterima oleh petani dan pedagangan grosir dari contoh di atas, petani menjual sekitar Rp 4.000,00 sedangkan grosir menjual sebesar Rp 6.500,00 kepada eceran dan konsumen akhir. Selain itu di Pasar Beringharjo harga beras jenis IR 64 (kw II) pada Jumat, 26 November 2011 tercatat sebesar Rp 7.600,00 di tingkat grosir sedangkan harga gabah kering giling IR 64 tersebut pada tingkat produsen atau petani hanya sebesar Rp 4.317 per kilogram (Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,2011).

Contoh di atas menunjukkan bahwa pentingnya tata niaga produk pangan di Indonesia demi menjaga kesejahteraan petani dalam hal pendapatan untuk menyambung kehidupannya. Oleh sebab itu, tanpa bantuan sistem tata

niaga beras yang baik, petani akan mengalami kerugian dan hal terburuk yang dapat terjadi adalah tidak melakukan proses produksi pangan dalam hal ini komoditas padi. Sistem tata niaga atau pemasaran yang efisien sangat dibutuhkan untuk mewujudkan harapan sebuah kesejahteraan bagi para petani (surplus produsen) bahkan bagi konsumen yang dinilai dalam besaran surplus konsumen.

Pada zaman Orde Baru, Bulog (Badan Urusan Logistik) memainkan peran yang krusial dalam sistem pemasaran beras di Indonesia. Bulog memiliki dua tugas utama yaitu pertama, menetapkan atau mempertahankan harga minimum gabah per kilogram dan juga pada waktu yang bersamaan memberi jaminan suatu pendapatan yang layak atau suatu keuntungan minimum sekitar 30% dari jumlah biaya produksi bagi petani dan kedua, mempertahankan suatu harga maksimum yang layak bagi konsumen. Selain peran stabilisasi harga tersebut, sebelum krisis ekonomi 1997/98, Bulog juga merupakan satu-satunya importir beras. Tetapi, setelah krisis tersebut, sebagai salah satu konsekuensi dari kesepakatan (*letter of intent*, LoI) antara pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF), Bulog kehilangan kekuatan monopolinya, dan badan tersebut mendapat suatu fungsi baru yakni mendistribusikan beras ke Rumah Tangga (RT) miskin (Tambunan, 2008).

Setelah produksi padi semakin meningkat, mata rantai pembelian beras oleh Bulog yang awalnya sederhana menjadi kompleks. Arifin (2004) dan Natawidjaja (2000) melakukan penelitian dan menemukan bahwa di

beberapa wilayah terdapat dua jalur pemasaran dalam tata niaga beras yaitu swasta dan pemerintah (Bulog), dimana jalur swasta lebih panjang daripada jalur pemerintah dengan banyak pelaku pasar yang diawali oleh pengumpul-pengumpul di desa, perusahaan-perusahaan penggilingan padi, grosir, dan berakhir oleh pedagang-pedagang eceran. Namun sistem pemasaran beras ternyata bervariasi dalam tingkat kompleksitasnya antar wilayah atau antar kelompok wilayah (Tambunan, 2008).

Perbedaan sistem tata niaga beras dari setiap wilayah di Indonesia merupakan hal yang wajar mengingat beragamnya karakteristik petani di setiap wilayah sehingga dalam menanggapi kebijakan pemerintah juga pasti akan berbeda. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga dasar gabah pada tahun 2005 telah berakhir sejak diterapkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2005 tentang kebijakan perberasan yang baru. Sehingga, sejak saat itu harga dasar gabah tidak diberlakukan lagi, pemerintah hanya mengeluarkan harga referensi. Jika yang terjadi demikian, petani semakin tidak memiliki daya tawar-menawar yang kuat dalam menawarkan hasil produksi gabah/ beras kepada para pelaku pasar, karena pemerintah tidak lagi menjamin harga yang diterima petani bila harga gabah jatuh. Jaminan terhadap harga dasar gabah yang sudah tidak ada lagi mengindikasikan bahwa diperlukan sistem tata niaga yang lebih baik. Sistem tata niaga yang baik sangat dibutuhkan dalam rangka menyejahterakan petani dan menjamin kebutuhan akan produksi pangan seluruh penduduk terpenuhi.

Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu sentra produksi padi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana sepertiga penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Para petani ini memanfaatkan lahan sawah seluas 18,7 kilometer dan tegalan 58,54 kilometer untuk memproduksi pangan.

Hingga kini Kabupaten Sleman masih merupakan daerah penghasil beras terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Komoditas yang dihasilkan tidak hanya padi tetapi juga salak pondoh, sayur-mayur, peternakan, perhutanan, perikanan dan perkebunan untuk memasok kebutuhan pangan D.I. Yogyakarta. Selain itu, Sleman tidak hanya memproduksi hasil-hasil pertanian menjadi barang saja tetapi juga dimanfaatkan sebagai objek wisata dalam bentuk *agricultural tourism* (http://pertahanan.slemankab.go.id).

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat produksi padi dan palawija di Sleman dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa produksi padi di daerah tersebut dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan, kecuali dari tahun 2006 ke 2007, terjadi penurunan produksi. Penurunan produksi padi pada tahun 2006 disebabkan karena adanya bencana alam yaitu gempa bumi yang melanda Provinsi DIY dan sekitarnya, sehingga pada waktu itu masih pada tahap pemulihan yang tidak mungkin dengan serta merta dapat berproduksi seperti biasanya. Meskipun secara umum produksi padi tidak mengalami peningkatan yang begitu besar setiap tahunnya hanya berkisar antara 250 hingga 268 ton, produksi padi di

Sleman adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan kabupaten yang terdapat di DIY.

Tabel 1.2
Produksi Padi & Palawija Tahun 2005-2009 di Kabupaten Sleman

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
1.	Padi Sawah	241.209	250.375	242.684	267.607	268.075	2.79
	Padi Ladang	1.307	1.274	194	1.321	1.329	123.56
	Total Padi	**242.516**	**251.649**	**242.878**	**268.928**	**269.404**	**2.80**
2.	Jagung	24.254	23.014	26.704	30.896	32.712	8.12
3.	Kedelai	838	893	711	1.129	772	3.34
4.	Kacang Tanah	5.260	4.459	4.785	5.496	4.441	-3.20
5.	Kacang Hijau	20	10	25	12	14	16.17
6.	Ubi Kayu	20.540	19.766	20.199	24.449	26.152	6.61
7.	Ubi Jalar	4.583	4.138	3.879	6.111	4.848	5.23
8.	Cantel	-	-	-	-	-	0.00

Sumber: BPS Provinsi DIY (d@tin distan diy), data diolah, 2005-2009

Tabel 1.3 berikut ini menunjukkan produktivitas padi dan palawija di Kabupaten Sleman dari tahun 2005-2009. Sama halnya seperti tingkat produksi padi dalam Tabel 1.2, produktivitas dari tanaman padi baik sawah maupun ladang di Kabupaten Sleman cenderung konstan atau hanya bergerak pada kisaran 57 hingga 61 kuintal per hektar. Hal ini tentunya terjadi karena berbagai alasan, kemungkinan terdapat teknologi yang tepat bagi kondisi pertanian di daerah itu sendiri atau terciptanya organisasi tani serta Koperasi Unit Desa (KUD) yang berfungsi kembali, bahkan rantai tata niaga gabah/ beras yang kian pendek dari yang sebelumnya, sehingga petani tidak lagi menjadi penerima harga (*price taker*) dalam hal menjual hasil produksinya diakibatkan daya tawar petani yang kuat.

Tabel 1.3
Produktivitas Padi & Palawija Tahun 2005-2009 di Kabupaten Sleman

No.	Jenis Tanaman	Produktivitas (Kw/Ha)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
1.	Padi Sawah	57.47	57.48	57.17	62.14	60.87	1.53
	Padi Ladang	30.04	29.21	29.21	30.17	30.42	0.34
	Total Padi	**57.19**	**57.20**	**57.10**	**61.82**	**60.58**	**1.53**
2.	Jagung	52.68	51.40	59.34	61.44	58.73	3.04
3.	Kedelai	16.37	15.89	16.31	18.88	16.64	0.90
4.	Kacang Tanah	8.70	8.56	8.95	10.25	10.2	0.60
5.	Kacang Hijau	8.00	7.14	7.14	8.00	7.37	-1.65
6.	Ubi Kayu	164.06	146.02	186.51	207.90	213.14	7.68
7.	Ubi Jalar	112.06	103.71	109.58	135.50	124.31	3.40
8.	Cantel	-	-	-	-	-	0.00

Sumber: BPS Provinsi DIY (d@tin distan diy), data diolah 2005-2009

Wilayah Kabupaten Sleman bagian barat yaitu Kecamatan Seyegan, Moyudan, Godean, dan Minggir merupakan areal pertanian lahan basah dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu dan gerabah. Sehingga setiap kecamatan di wilayah barat Kabupaten Sleman ini sangat mendukung untuk bercocok tanam terutama padi sawah. Seyegan adalah wilayah yang dijadikan tempat penelitian, karena Kecamatan Seyegan adalah salah satu sentra produksi padi di DIY. Selain itu, diantara ke empat kecamatan di wilayah barat Kabupaten Sleman yang merupakan lahan pertanian, Kecamatan Seyegan memiliki rata-rata produksi padi sawah yang terbesar, hal ini ditunjukkan dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Luas Tanah, Panen, Rata-Rata Produksi & Produksi Padi Sawah
Kecamatan Seyegan, Tahun 2010

Desa	Luas (Ha)		Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Kw)
	Tanah	Panen		
Margoluwih	755	844	60,24	50.842,56
Margodadi	799	886	60,24	53.372,64
Margomulyo	528	562	60,24	33.854,88
Margoagung	568	602	60,24	36.264,48
Margokaton	749	835	60,24	50.300,40
Kec. Seyegan	**3.399**	**3.729**	**60,24**	**224.6634,96**

Sumber: BPS, Seyegan Dalam Angka 2011, 2010

Seperti terlihat pada Tabel 1.4 di atas, produksi padi terbesar terdapat di Desa Margodadi, yaitu sebesar 53.372,4 kuintal pada tahun 2010. Sehingga peniliti tertarik untuk melihat bagaimana kondisi tata niaga gabah/ beras di Desa Margodadi tersebut. Penelitian ini akan mencoba menggambarkan diagram alur tata niaga gabah/ beras kemudian besaran margin pemasaran setiap pelaku pasar serta karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku pasar dalam rantai tata niaga gabah/ beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Oleh karena berbagai penjelasan di atas, maka usulan judul penelitian ini adalah **"Tata Niaga Gabah/Beras" (Studi Kasus Petani Padi di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada bagian latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rantai tata niaga gabah/beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana komponen biaya dan margin pemasaran setiap pelaku pasar dalam rantai tata niaga gabah/beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana karakteristik serta permasalahan setiap pelaku pasar dalam tata niaga gabah/beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui rantai tata niaga gabah/beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui komponen biaya dan margin pemasaran setiap pelaku pasar dalam rantai tata niaga gabah/beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui karakteristik dan permasalahan setiap pelaku pasar dalam tata niaga gabah/beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Instansi-instansi pemerintahan terkait dalam sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan mengenai tata niaga gabah/beras di Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.
2. Bahan acuan dan referensi serta pembanding studi/ penelitian yang terkait dengan sektor pertanian.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan sistem pemasaran atau tata niaga gabah/ beras mulai dari pengertian hingga biaya dalam sistem pemasaran tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai data dan sumber data, alat analisis dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu mengenai tata niaga gabah/ beras, komponen biaya dan karakteristik permasalahan yang dihadapi setiap pelaku pasar di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah.